

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pinrang

A. Sudirman Bachtiar

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin

Email: andisudirman0526@gmail.com

### Abstract

*Fishing communities are coastal communities that play an important role in supporting the development of the fisheries sector and regional food security. However, various challenges such as limited human resource capacity, restricted access to technology and information, weak fishermen institutions, and the suboptimal implementation of empowerment policies continue to hinder efforts to improve fishermen's welfare. This study aims to analyze the role of the Pinrang Regency Government in empowering fishing communities. The research employed a qualitative descriptive approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving officials from the Fisheries Office, fishermen groups, and coastal communities as research informants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Pinrang Regency Government implements fishermen empowerment through three main aspects: education and training, access to knowledge, technology and information, and institutional strengthening. Education and training programs are designed to improve fishermen's technical skills and entrepreneurial capacity. Access to knowledge, technology, and information is facilitated through extension services, information dissemination, and the introduction of modern fisheries technologies. Meanwhile, institutional strengthening is carried out through the establishment and development of Joint Business Groups (Kelompok Usaha Bersama/KUB) as platforms for empowerment and business development among fishermen. Although several challenges remain, these empowerment efforts have contributed to improving the capacity and self-reliance of fishing communities in Pinrang Regency.*

**Keywords:** Fishermen Community Empowerment, Local Government Role, Education and Training, Institutional Strengthening, Pinrang Regency.

### Abstrak

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah. Namun, berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi, lemahnya kelembagaan nelayan, serta belum optimalnya kebijakan pemberdayaan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparaturnya Dinas Perikanan, kelompok nelayan, serta masyarakat pesisir sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui tiga aspek utama, yaitu pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Program pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan nelayan. Kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan media informasi, serta pengenalan teknologi perikanan yang lebih modern. Sementara itu,

penguatan kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan usaha nelayan. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, upaya pemberdayaan yang dilakukan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Peran Pemerintah Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Penguatan Kelembagaan, Kabupaten Pinrang.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>. Kondisi geografis ini menjadikan sektor kelautan, khususnya perikanan, sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Potensi perikanan Indonesia sangat besar, mencakup subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan total potensi lestari sekitar 67 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 10,2 juta ton berasal dari perikanan tangkap dan sisanya dari budidaya perairan. Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, kontribusi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah akibat berbagai kendala struktural dan lemahnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan.

Pemerintah daerah, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat pesisir. Fungsi ini mencakup pelaksanaan kewenangan desentralisasi dalam bidang perikanan, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program pemberdayaan. Namun, kenyataannya program pemberdayaan nelayan yang telah dijalankan sejak tahun 1993, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, belum menunjukkan hasil signifikan. Rendahnya kualitas hidup nelayan dan keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi permasalahan utama, termasuk di Kabupaten Pinrang yang memiliki potensi pesisir yang besar tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini, pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pinrang masih terbatas pada peraturan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah membuat program pemberdayaan kurang efektif dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi nelayan. Untuk itu, diperlukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu menjamin implementasi kebijakan pemberdayaan secara optimal.

Secara ekologis, wilayah pesisir Kabupaten Pinrang telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan melalui kegiatan penangkapan ikan, pemanfaatan kerang-kerangan, mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir lainnya. Namun, potensi ini kini mengalami degradasi akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan fisik, pencemaran, dan aktivitas eksploitasi ilegal yang merusak ekosistem. Penurunan kualitas lingkungan berdampak langsung terhadap hasil tangkapan dan menurunkan pendapatan nelayan. Mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi, yang berpotensi memicu konflik antar nelayan dalam perebutan wilayah tangkap.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tahun 2025–2026 dijelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti masih dominannya praktik tradisional, rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan nelayan, kurangnya pendampingan kelompok, serta minimnya investasi swasta dan pengembangan koperasi nelayan. Padahal

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 telah menegaskan tugas-tugas Dinas Perikanan dalam pembinaan kelompok pembudidaya, pengolahan hasil tangkap, dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara menyeluruh. Sayangnya, pelaksanaan teknis belum sejalan dengan mandat normatif tersebut.

Data yang dihimpun Dinas Perikanan menunjukkan bahwa kontribusi kelompok nelayan terhadap produksi ikan mengalami penurunan rata-rata 0,25% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kelompok nelayan menyumbang 44,9% dari total produksi ikan daerah, namun pada tahun 2023 angka ini menurun menjadi 40%. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh kerusakan alat tangkap, rendahnya manajemen kelompok, dan kurangnya dukungan teknis. Berdasarkan realitas ini, diperlukan kebijakan pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada penguatan kapasitas nelayan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam memberdayakan masyarakat nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pesisir.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang. Metode studi kasus dipilih karena mampu mengungkap suatu fenomena secara menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Yin (2009), studi kasus digunakan ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas dan diperlukan penggunaan berbagai sumber data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus

utama pada Dinas Perikanan sebagai pelaksana kebijakan serta masyarakat nelayan sebagai sasaran program pemberdayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, antara lain Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang Pemberdayaan, staf teknis, ketua kelompok nelayan, serta nelayan individu. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat pesisir. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Teknik triangulasi diterapkan untuk meningkatkan validitas data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan; penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif; sementara penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi dan validasi terhadap temuan yang diperoleh.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Perikanan telah mengimplementasikan berbagai program dalam rangka mendukung pemberdayaan nelayan. Strategi tersebut difokuskan pada tiga indikator utama, yakni pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan

kelompok nelayan. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah mencerminkan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Pembahasan dalam bagian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan program-program tersebut diterapkan dan sejauh mana keberhasilannya dalam mendorong peningkatan kapasitas nelayan. Penjelasan akan disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai fokus penelitian, serta dianalisis menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat yang relevan. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya, pembahasan akan disusun dalam tiga subbagian utama yang mengelaborasi indikator-indikator pemberdayaan tersebut secara sistematis dan mendalam.

### **Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan merupakan fondasi utama dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Pinrang menyadari bahwa kompetensi teknis dan manajerial nelayan masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan program pelatihan yang terarah dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses formal, melainkan mencakup transfer pengetahuan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari nelayan. Program pelatihan yang dirancang oleh Dinas Perikanan mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya dan penangkapan ikan yang berkelanjutan, manajemen usaha, hingga diversifikasi pengolahan hasil laut.

Strategi pelaksanaan pelatihan dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

Penjadwalan pelatihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu waktu melaut para nelayan, sehingga partisipasi mereka tetap tinggi. Selain itu, pendekatan kultural juga diadopsi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan penyuluh lokal sebagai fasilitator pelatihan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan meminimalisasi resistensi masyarakat terhadap program pemerintah. Pemerintah juga menggunakan metode pelatihan berbasis kelompok, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), agar terjadi proses pembelajaran kolektif yang memperkuat solidaritas sosial antar nelayan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan masih dihadapi dalam hal persepsi masyarakat terhadap pentingnya pelatihan. Sebagian besar nelayan masih menganggap bantuan fisik seperti alat tangkap atau modal usaha lebih penting dibandingkan dengan pelatihan non-material. Persepsi ini berakar dari pola ketergantungan pada intervensi jangka pendek yang sebelumnya umum dijalankan oleh banyak program pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Perikanan terus melakukan sosialisasi bahwa pelatihan adalah investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan usaha nelayan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pelatihan sangat bergantung pada kesesuaian materi dengan kebutuhan dan kondisi lokal nelayan. Oleh sebab itu, kurikulum pelatihan selalu dikaji ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan dinamika pasar, perubahan iklim, serta teknologi perikanan terbaru. Pemerintah juga mendorong model pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana para nelayan diajak langsung mempraktikkan materi pelatihan di lapangan. Model ini dirancang untuk meningkatkan retensi pengetahuan serta mempercepat adopsi praktik baru di tingkat komunitas nelayan.

Program pelatihan yang dilakukan juga menyoasar keluarga nelayan, khususnya perempuan, dengan harapan tercipta diversifikasi sumber pendapatan di lingkungan rumah tangga nelayan. Pelatihan pengolahan hasil laut seperti pembuatan abon ikan, kerupuk udang, dan olahan lainnya menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan yang berorientasi gender. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan pesisir yang selama ini cenderung termarginalkan dalam program-program formal.

Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan menjadi pilar strategis dalam pemberdayaan nelayan karena mampu membangun kapasitas individu dan kolektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ekologi. Meskipun terdapat hambatan persepsi dan keterbatasan sumber daya, upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam merancang program pelatihan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal menunjukkan arah yang progresif dalam membentuk nelayan yang lebih mandiri, terampil, dan berdaya saing.

### **Kemudahan Akses terhadap Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi**

Kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan elemen penting dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah Kabupaten Pinrang, melalui Dinas Perikanan, berupaya membangun sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan nelayan dalam menghadapi perubahan pasar dan ekosistem kelautan. Akses informasi yang cepat dan relevan dapat membantu nelayan dalam menentukan waktu melaut, jenis alat tangkap yang digunakan, hingga memproyeksikan harga pasar hasil tangkapan. Oleh karena itu, diseminasi informasi yang tepat sasaran

menjadi komponen strategis dalam upaya pemberdayaan berbasis teknologi.

Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah mengembangkan beberapa media penyebaran informasi, seperti penyuluhan langsung, media cetak, radio komunitas, hingga platform digital. Sistem informasi penyuluhan perikanan mulai diperkenalkan di beberapa wilayah yang telah memiliki infrastruktur komunikasi dasar. Melalui sistem ini, nelayan dapat mengakses data tentang musim penangkapan ikan, cuaca laut, lokasi tangkapan potensial, hingga tata kelola zona tangkap. Namun demikian, efektivitas penyebaran informasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru.

Kondisi geografis wilayah pesisir yang tersebar dan infrastruktur komunikasi yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses informasi. Beberapa desa nelayan masih mengalami kesenjangan digital yang signifikan, sehingga distribusi informasi sering kali tidak berjalan secara optimal. Menyadari kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang menggunakan pendekatan alternatif dengan memanfaatkan KUB dan tokoh masyarakat sebagai kanal distribusi informasi. Strategi ini mampu menjangkau komunitas yang belum tersentuh oleh teknologi digital secara langsung, sekaligus membangun kepercayaan sosial dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan.

Selain informasi teknis dan cuaca, Pemerintah Daerah juga menyediakan edukasi terkait teknologi penangkapan dan budidaya ikan yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik eksploitatif yang merusak ekosistem laut. Nelayan diperkenalkan dengan teknologi baru seperti bubu ramah lingkungan, jaring selektif, dan metode penangkapan berbasis sonar. Teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan hasil tangkapan secara

berkelanjutan, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran ekologis di kalangan masyarakat pesisir sebagai bagian dari perubahan perilaku.

Dalam aspek penguatan sistem informasi, pemerintah bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas dalam pengembangan perangkat lunak serta pelatihan operator sistem. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, pelatihan literasi digital juga diberikan kepada kelompok nelayan muda agar mereka mampu mengelola informasi secara mandiri dan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknologi, tetapi juga mengurangi ketimpangan generasi dalam akses terhadap inovasi dan pengetahuan.

Strategi pemerintah dalam memfasilitasi akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi menunjukkan komitmen untuk membangun masyarakat nelayan yang lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan dan pasar. Meskipun masih terdapat kendala struktural dan kultural, pendekatan multikanal dan berbasis komunitas yang diterapkan menjadi langkah progresif dalam membentuk sistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi modal penting dalam mendorong keberdayaan masyarakat nelayan menuju transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

### **Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan menjadi elemen sentral dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan karena kelembagaan merupakan wadah koordinasi dan pengorganisasian nelayan dalam mengelola sumber daya bersama. Pemerintah Kabupaten Pinrang secara aktif membentuk dan membina Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai lembaga akar rumput yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan program

pemberdayaan. Melalui KUB, nelayan difasilitasi dalam berbagai aspek seperti manajemen kelompok, perizinan usaha, akses bantuan, dan pendampingan teknis. Lembaga ini menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat pesisir.

Peran KUB tidak hanya terbatas pada penerima bantuan, tetapi juga diperluas menjadi aktor aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah secara rutin melakukan pembinaan terhadap KUB melalui pelatihan manajerial, penguatan jaringan usaha, serta pemberdayaan kepemimpinan lokal. Dalam setiap siklus program, evaluasi kelembagaan dilakukan untuk memastikan bahwa KUB dapat berfungsi secara mandiri dan akuntabel. Hal ini menunjukkan adanya transformasi kelembagaan dari sekadar formalitas administratif menuju lembaga masyarakat sipil yang berfungsi efektif.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan kelembagaan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah kualitas kepemimpinan kelompok yang belum merata. Beberapa KUB belum memiliki pemimpin yang memiliki kapasitas manajerial dan legitimasi sosial yang kuat di tengah komunitasnya. Selain itu, partisipasi anggota juga masih rendah pada sebagian besar KUB, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha kelompok. Faktor ini menyebabkan rendahnya kohesi sosial dan menurunnya efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan.

Pemerintah daerah telah mengidentifikasi kelemahan tersebut dan berupaya memperkuat mekanisme kaderisasi dalam tubuh kelembagaan nelayan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mendorong regenerasi kepemimpinan melalui pelibatan nelayan muda dalam struktur organisasi KUB. Upaya ini juga dibarengi dengan pelatihan

kepemimpinan dan pelatihan berbasis masalah agar para pemimpin kelompok memiliki kemampuan untuk merespons dinamika lokal dengan pendekatan yang solutif. Dengan demikian, keberlanjutan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh intervensi eksternal, tetapi juga oleh kapasitas internal yang tumbuh dari komunitas itu sendiri.

Kelembagaan nelayan juga diarahkan untuk menjadi mitra strategis dalam kemitraan usaha antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan mikro. Pemerintah mendorong KUB untuk memiliki legalitas formal agar dapat mengakses berbagai skema pembiayaan dan program afirmatif lainnya. Penguatan kelembagaan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat peran KUB sebagai penerima program, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, KUB yang telah mapan menjadi role model yang direplikasi di desa pesisir lainnya, menunjukkan potensi kelembagaan sebagai agen transformasi sosial-ekonomi.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak dalam pemberdayaan masyarakat nelayan karena kelembagaan menentukan sejauh mana intervensi pembangunan dapat diserap, diinternalisasi, dan direproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Meskipun tantangan internal seperti kepemimpinan dan partisipasi masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan komitmen untuk menumbuhkan kelembagaan yang tangguh, inklusif, dan berbasis komunitas. Transformasi kelembagaan ini menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan masyarakat pesisir yang lebih mandiri dan berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan masyarakat

nelayan dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berlapis, mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Ketiga indikator tersebut saling terkait dan memperkuat dalam upaya membangun masyarakat pesisir yang lebih berdaya secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Pada aspek pendidikan dan pelatihan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui kegiatan pelatihan teknis, pengolahan hasil laut, dan kewirausahaan perikanan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal persepsi masyarakat terhadap pentingnya pelatihan dibandingkan bantuan fisik, pemerintah tetap konsisten menjalankan program pelatihan secara partisipatif dan kontekstual. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan keterampilan praktis masyarakat nelayan dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, dalam aspek kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memfasilitasi berbagai saluran komunikasi dan diseminasi informasi yang relevan dengan kebutuhan nelayan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk penyuluhan langsung, pemanfaatan media cetak, radio komunitas, hingga aplikasi digital. Walaupun masih terdapat kesenjangan infrastruktur komunikasi dan literasi digital, pemerintah berhasil menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal, misalnya dengan mengoptimalkan peran KUB dan penyuluh sebagai perantara informasi.

Pada aspek penguatan kelembagaan, pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk, membina, dan mendampingi kelompok nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB bukan hanya menjadi wadah penerima program, tetapi juga dikembangkan sebagai aktor utama dalam

perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Walau demikian, tantangan dalam hal partisipasi anggota dan kepemimpinan kelompok tetap menjadi hambatan yang perlu dibenahi secara sistematis melalui kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abelshausen, B., Vanwing, T., & Jacquet, W. (2015). Participatory Integrated Coastal Zone Management In Vietnam: Theory Versus Practice Case Study: Thua Thien Hue province. *Journal of Marine and Island Cultures*, 4(1), 42-53
- Adimihardja SA, Hamid G dan Rosa E. 2013. Pengaruh pemberian kombinasi kompos sapi dan fertimix terhadap pertumbuhan dan produksi dua kultivar tanaman selada (*Lactuca sativa* L.) dalam sistem hidroponik rakit apung. *J Pertanian* 4 (1 : 6-20) ISSN 2087-4936.
- Bengen, D. G. (2010). Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serta pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. *Prosiding Pelatihan pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat Kajian Sumberdaya pesisir Dan Lautan FPIK IPB.*
- Creswell, John W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches.* California: Sage Publication Inc
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelaja
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama Press
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
- Inu Kencana Syafiee, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan yakni dengan adanya yang membidangi pemberdayaan nelayan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 14/MEN/2009 Tentang Mitra Bahari. (n.d.).
- PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
- Ryaas Rasyid, 2000, *Dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Harian Umum Suara Pembaruan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gava Media
- Sunarno, Siswanto, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis.* Jakarta: Gramedia
- Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Winarni. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong abad 21 :Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media.
- Yin, R. K. (2009). "Case Study Research: Design and Method" (4rd ed.). California: Sage Publications, Inc.
- Yuwono, N., 1998. Teknik Pantai Volume III. Yogyakarta: Biro Penerbit Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Andreas, 2007